

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT DAN PKH MASYARAKAT  
DI DESA BONTOMALLING KECAMATAN PASIMASUNGGU  
TIMUR KEPULAUAN SELAYAR**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

**RISNAWATI**

Npm. 105381105316

25/10/2021

Dep  
Sub. Alumnus

P/0140/SOS/21 CA  
RIS

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Risnawati, 105381105316** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 498 Tahun 1443 H/2021 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Sabtu, 25 September 2021.

21 Safar 1443 H

Makassar, .....

28 September 2021 M

### PANITIA UJIAN

- Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asses, M. Ag (.....)
- Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D (.....)
- Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd (.....)
- Penguji
1. Dr. Fatimah Azis, M. Pd (.....)
  2. Dr. Nurlina Subair, M. Si (.....)
  3. Suardi, S. Pd. M. Pd (.....)
  4. Herdianty R, S. Pd. M. Pd (.....)

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

  
Des. H. Nurdin, M. Pd.  
575 474

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan BLT dan PKH Masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar

Nama : **Risnawati**

NIM : **105381105316**

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

21 Safar 1443 H

Makassar,

28 September 2021 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Suardi, S. Pd, M. Pd

  
Herdianty R. S. Pd., M. Pd

Mengetahui





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Risnawati  
NIM : 105381105316  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Dengan Judul : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomallig Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengetahuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Unismuh Makassar atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Makassar, 2021

Yang Membuat Pernyataan

**Risnawati**  
**NIM: 105381105316**



### SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Risnawati  
Nim : 105381105316  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2021

Yang Membuat Perjanjian

**Risnawati**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tapi kerja keraslah yang menjadi penentu kesuksesan yang sebenarnya.



## ABSTRAK

Risnawati 2021 Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat (studi kasus masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, pembimbing I Suardi, dan pembimbing II Herdianty, R.

Implementasi kebijakan BLT dan PKH yang dilaksanakan di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar telah menimbulkan beberapa faktor dan dampak bagi masyarakat.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BLT dan PKH, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH dan dampak implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin. Lokasi penelitian ini berada di desa bontomalling kecamatan pasimasunggu timur kepulauan selayar. Informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah kepulauan selayar dan masyarakat kepulauan selayar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata kunci : implementasi kebijakan BLT dan PKH



## ABSTRACT

*Risnawati 2021 Implementation of community BLT dan PKH Policies (a case study of the community in Bontomalling village, East Pasimasunggu Districh, Selayar Islans) thesis on the faculty of teacher training and education at the Universty of Muhammadiyah Makassar, Supervisor I Suardi and Supervisor II Herdianty, R.*

*The implementation of the BLT dan PKH Policies carried out in Bontomalling Village, East Pasimasunnggu Districh, Selayar Islans has caused several factors and impacts on the community.*

*This thesis uses a qualitative research type with a case study approach aimed at knowing the implementation of BLT and PKH Policies and the impact of implementing BLT and PKH Policies on the poor. The location of this research is in BontomallingVillage, East Pasimasunggu District, Selayar Islands. The informants in this study were the government of the Selayar Islands and the people of the Selayar Islands. Data collection in namely observation, interviews, and documentation.*

**Keywords :** *Implementation of BLT and PKH Policies.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pertama dan yang paling utama tiada kata yang paling indah yang terucap dari lisan seorang hamba selain pujian syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya serta kenikmatan iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Shalawat serta salam yang penulis sanjung agungkan kepada Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang paling sempurna, untuk menuntut ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan, dan dari Ridha Allah SWT serta Syafa'at Rosulullah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasmasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Proposal ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, motivasi beserta doa kepada penulis dalam penyelesain proposal ini. Keberhasilan dalam penyelesaian proposal ini tidak hanya terletak pada diri peneliti semata tetapi tentunya banyak pihak yang memberikan sumbangsi khususnya kepada kedua orangtua. penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.H.Ambo Asse.,M.Ag.Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini

2. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Drs. H. Nurdin, M.Pd ketua prodi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar,
4. Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D sekretaris Jurusan prodi sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Suardi, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan Herdianty R, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran membimbing dalam menyelesaikan proposal ini, Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhana Wata'ala dapat memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya saran dan kritik yang membangun akan penulis terimakasih. Akhirnya hanya kepada Allah Subhana Wata'ala penulis serahkan segalanya, mudah - mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Makassar, 2021

Peneliti

Risnawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Defenisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP</b>	
A. Kajian Konsep.....	11

B. Kajian Teori.....	23
C. Kerangka Pikir.....	25
D. Hasil Penelitian Terdahulu.....	27

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus penelitian .....	33
D. Informan Penelitian.....	35
E. Jenis dan Sumber data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan data.....	38
H. Analiss data.....	39
I. Teknik Keabsahan data.....	41

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	45
B. Letak geografis.....	48
C. Keadaan penduduk.....	49
D. Keadaan pendidikan.....	50

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	52
1. Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling.....	51
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH .....	56

3. Dampak Implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin.....	59
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>65</b>
1. Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling.....	65
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH.....	67
3. Dampak Implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin.....	69
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bagan Kerangka pikir.....	27
Tabel 2.2 lokasi penelitian.....	33
Tabel 2.3 Informan penelitian.....	37
Tabel 2.4 Keadaan penduduk.....	50
Tabel 2.5 Keadaan pendidikan.....	51



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar ..... 53
- Gambar 2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar ..... 56
- Gambar 3. Dampak Implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar ..... 60



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang jumlah penduduknya besar atau menempati urutan ke lima di dunia. berdasarkan data Bopenas (2018) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 264 juta orang dan dipekirakan pada akhir tahun 2018 mencapai 262 juta orang yang terdiri dari 133,17 juta laki – laki 131,88 juta jiwa perempuan. sebagai Negara berkembang Indonesia tidak terlepas dari masalah kemiskinan (Wom, 2019).

Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi disetiap Negara termasuk Indonesia. Provinsi Sulawesi selatan salah satu daerah Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. meski menjadi salah satu Provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi selatan masih terbilang cukup tinggi. berdasarkan data resmi yang dirilis (menyampaikan secara resmi) oleh BPS, penduduk miskin di Provinsi Sulawesi selatan mengalami luktiasi jumlah dan persentase penduduk miskinnya. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi selatan pada tahun 2011 sebanyak 10,27 persen tahun 2012 sebanyak 9,82 persen dan tahun 2013 sebanyak 10,32 persen tahun 2014 sebanyak 9,54 dan tahun 2015 sebanyak 10,12 persen. semakin tinggi persentase penduduk miskin disuatu daerah tentu saja semakin banyak penduduk yang masih dalam kategori miskin (Ismi, 2018).

Menurut Ritonga (2011) kemiskinan adalah keadaan kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. kehidupan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sehingga masih termasuk dalam kategori berkembang.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kemiskinan adalah keadaan kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang dimana banyak daerah atau wilayah yang sampai saat ini masih berkembang.

Salah satu Negara yang berkembang di Negara Indonesia yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak diantara  $5^{\circ}42'-7^{\circ}-35'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}15' - 122^{\circ}30'$  bujur Timur, Luas keseluruhan wilayah mencakup  $10,503,69 \text{ km}^2$  (12,92%) dan luas laut  $9,146,66 \text{ km}^2$  (87,08%) (Abdul, 2015).

Berdasarkan geografis Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar terletak diantara  $5^{\circ}42'-7^{\circ}-35'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}15' - 122^{\circ}30'$  bujur timur, luas keseluruhan wilayah mencakup  $10,503,69 \text{ km}^2$  (12,92%) dan luas laut  $9,146,66 \text{ km}^2$  (87,08%).

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif cepat, yang dimana berpengaruh

pada distribusi penduduk. pola distribusi penduduk yang merata dapat mempengaruhi kualitas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dimana jumlah penduduk yang ada pada tahun 2008 sebanyak 119,811 jiwa yang terdistribusi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar (Faried Bainta, 2010).

Kepulauan Selayar memiliki makna yang dimana Selayar berasal dari kata cedaya (Bahasa sangsekerta) yang berarti satu layar karena kenon katanya banyak perahu satu layar yang singgah di pulau tersebut sehingga namanya berubah menjadi Kepulauan Selayar selain nama Selayar pulau ini dinamakan pula dengan nama tana doang. dimasa lalu pulau Selayar menjadi tempat berdo'a bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik kebarat maupun ketimur. di Kepulauan Selayar terdapat beberapa pantai yang sangat indah dan menarik dengan berbatuan yang beranekaragam, dan pasimya berwarna putih memiliki daya tarik yang khas pemandangan yang sangat luar biasa beda dari yang lainnya sehingga banyak masyarakat dari luar daerah yang berkunjung di kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar termasuk pulau yang terpencil dan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai beberapa Kecamatan dan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kepulauan Selayar yaitu Kecamatan Pasimasunggu Timur yang merupakan bagian dari Kepulauan Selayar yang terpencil. di Kepulauan Selayar terdapat masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda – beda dengan masyarakat satu dan masyarakat lainnya. bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Selayar adalah Bahasa Selayar. Bahasa Selayar salah satu bahasa yang terdapat di Kepulauan Selayar. Bahasa Selayar Sebuah bahasa

yang dipertuturkan atau yang digunakan di Pulau Selayar, dan beberapa pulau lainnya seperti yang terdapat di pulau Jampea khususnya di daerah Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan pasimasunggu Timur di Kabupaten Kepulauan Selayar. masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar sampai sekarang disana masih menggunakan Bahasa Selayar sebagai bahasa sehari - hari dan sebagai alat komunikasi saat pertemuan-pertemuan resmi digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa Selayar berada dalam kategori yang cukup baik, tentram dan aman karena mereka masih menggunakan bahasanya sebagai bahasa sehari - hari oleh karena itu masyarakat kepulauan Selayar sampai saat ini pun Bahasa Selayar mulai diajarkan di sekolah – sekolah sebagai muatan local yang dimana salah satu contoh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yaitu mata pelajaran Bahasa daerah selain itu bahasa yang digunakan di kepulauan selayar juga terdapat Bahasa Bugis dan Bahasa Indonesia dan lain - lain. Kepulauan Selayar terdiri dari beberapa pulau yang agak besar dan sekian banyak pulau - pulau kecil diantaranya adalah Pulau Selayar, panjangnya kira – kira 120 km dan lebarnya kira-kira 18 km, sedangkan yang lebih kecil adalah Pulau Jampea, dan lain-lain Pulau Jampea yang dikenal dengan sebutan Benteng Jampea, dimana pulau ini memiliki pesona yang sangat indah serta keindahan alam baik alam bawah laut dan juga kekayaan alam di darat dan sangat menarik di pulau jampea (Benteng Jampea) merupakan pelabuhan terpanjang dan Pulau Jampea bisa juga menikmati berbagai macam tempat wisata berupa wisata pulau yang indah dengan memiliki penduduk yang sangat baik dan sangat ramah kepada semua orang dan pada masa lalu Kabupaten Kepulauan Selayar pernah

menjadi rute perdagangan menuju pusat rempah – rempah dan mata pencahariannya masyarakat yang ada Kepulauan Selayar dari dulu sampai sekarang yaitu sebagai petani, dan nelayan dan sampai saat ini masyarakat Kepulauan Selayar perekonomiannya sangat rendah dan sampai sekarang kemiskinan di Kepulauan Selayar semakin meprihatinkan karena masyarakat Kepulauan Selayar yang semakin hari tingkat kemiskinannya semakin meningkat dan bahkan sampai saat ini kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Selayar masih belum mengalami perubahan.

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Selayar masih belum mengalami perubahan karena disebabkan oleh adanya beberapa faktor. faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat di Kepulauan Selayar yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan yang rendah, Pemutusan hak kerja (PHK), keterbatasan akses modal, serta banyaknya masyarakat yang malas bekerja dan tidak mau berusaha serta kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat tersebut sehingga pengangguran yang ada di Kepulauan Selayar semakin hari semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin bertambah sehingga sampai saat ini keadaan didalam masyarakat Kepulauan Selayar dari dulu sampai sekarang masih tetap miskin hingga sampai sekarang. kemiskinan selalu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Kepulauan Selayar hingga sampai saat ini ekonominya masih sangat kurang memadai oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat miskin yang ada di Selayar berupa bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) dengan adanya bantuan tersebut maka

diharapkan kebijakan pemerintah dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur yaitu pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan Program keluarga harapan (PKH) dan bantuan ini dilakukan secara bertahap dengan adanya kebijakan dari pemerintah bantuan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar dan dapat mengurangi angka kemiskinan dan memutuskan rantai kemiskinan, dan untuk itu pemerintah Kepulauan Selayar diharapkan juga dapat memberikan bantuan secara merata karena implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) di Kepulauan Selayar saat ini belum tersalurkan secara merata.

Berdasarkan Observasi awal yang ditemukan menerima BLT sebanyak 47 orang sedangkan PKH sebanyak 56 orang dilapangan Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur penulis menemukan bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) dari segi penyaluran masih kurang tepat sasaran, berdasarkan wawancara awal kepada warga yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan rumah yang kurang layak ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui BLT dan PKH ternyata belum merata hal ini terlihat pada masyarakat Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Salah satunya Pada masyarakat Desa Bontomalling yang belum mendapat bantuan BLT dan PKH yaitu L karena bantuan dari pemerintah hanya tertuju pada masyarakat yang sudah terdaftar di pusat namanya saja, respon dari L terhadap bantuan yang tidak merata yaitu dia merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam memberikan bantuan.

Selain itu Pada masyarakat Desa Bontomalling yang belum mendapat bantuan BLT dan PKH yaitu S karena bantuan dari pemerintah hanya tertuju pada masyarakat yang sudah terdaftar di pusat namanya saja, respon dari S terhadap bantuan yang tidak merata dia merasa kecewa terhadap pemerintah karena setiap ada bantuan yang disalurkan dia tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan tersebut.

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) di Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur saat ini belum tersalurkan secara merata dapat dilihat masih banyak kalangan masyarakat yang belum tersentuh sama sekali bantuan dari pemerintah pada hal mereka termasuk warga yang tidak berkecukupan, atau masih dalam kategori kekurangan dan disamping itu juga diakibatkan karena adanya kecenderungan didalam masyarakat dan ketidaksesuaian antara data penerima dengan realitas kondisi ekonomi masyarakat sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH). pemberian bantuan tersebut sebenarnya untuk semua kalangan masyarakat yang terdapat di Kepulauan Selayar tetapi kenyataanya pemberian bantuan tersebut dari pemerintah kepada masyarakat tidak tepat sasaran karena yang mendapat bantuan

hanya yang terdaftar namanya di pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di pusat tidak mendapat bantuan yang dimana masyarakat yang mampu justru mendapat bantuan dari pemerintah sedangkan masyarakat yang tidak mampu justru tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga banyak masyarakat di Kepulauan Selayar merasa konflik dan merasa tidak adil karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tersalurkan secara merata sehingga sampai saat ini terjadi kecemburuan Sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka selaku penulis tertarik untuk mengangkat Judul penelitian yaitu : **Implementasi Kebijakan BLT dan PKH Masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar ?
3. Bagaimana dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar ?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling kecamatan pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat praktis**

1. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan rujukan Implementasi kebijakan BLT dan PKH

##### **b. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan sosial dan kemajuan untuk pembentukan program baru di pemerintahan
2. Sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

- a. Implementasi adalah suatu bentuk pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan dalam sebuah kegiatan.
- b. Kebijakan adalah berupa keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok demi untuk mencapai tujuan bersama.

- c. Program bantuan langsung tunai adalah salah satu program bantuan yang diterapkan yang dimana bantuan tersebut berupa uang tunai yang tidak memiliki syarat.
- d. Program keluarga harapan (PKH) adalah sebuah program yang diterapkan yang dimana bantuan tersebut dalam bentuk non tunai dan memiliki syarat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian konsep

##### a. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya.

Pengertian Implementasi menurut para ahli:

##### 1. Tachjan

Menurut Tachjan (2006) pengertian Implementasi merupakan suatu tindakan atau juga kegiatan atau aktifitas yang dilakukan setelah adanya kebijakan

##### 2. Hanifah Harsono

Menurut Hanifah Harsono (2002) pengertian Implementasi merupakan suatu proses untuk dapat melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.

##### 3. Nurdin Usman

Menurut Nurdin Usman (2002) Pengertian Implementasi merupakan suatu yang bermuara pada aktifitas yang dilakukan dengan secara sistematis serta terikat oleh meknisme. karena begitu, maka implementasi tersebut bukan sekedar aktifitas yang terencana serta untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (2016) pengertian Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijakan yakni kejadian – kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan Negara yang mencakup usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Menurut Guntur Setiawan (2004) pengertian Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

#### 4. Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (2006) pengertian Implementasi ialah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Tachjan (2008) pengertian Implementasi secara etimologis menjelaskan dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Implementasi adalah suatu penerapan aktivitas yang saling berinteraksi atau sebuah tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan

kegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah atau juga swasta yang diarahkan keputusan pada tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Situmorang (2016) pengertian Implementasi merupakan proses yang dinamis faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap – tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Implementasi adalah sebuah proses yang dinamis dalam memengaruhi tahap awal dan mempunyai konsekuensi yang kecil.

Menurut Abdul wahab (2012) pengertian Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Implementasi adalah memahami apa terjadi atau sudah dirumuskan tentang kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat tersebut.

#### **b. Kebijakan**

Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai serta juga praktik - praktik yang terarah (*aprojected program of goals values and practices*).

Menurut Edi Suharto (2007) pengertian kebijakan adalah keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengolahan dan pendistribusian sumber daya public demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat dan warga Negara.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah keputusan – keputusan yang dipilih dalam memilih tindakan yang secara langsung demi untuk kepentingan penduduk masyarakat atau warga Negara.

Menurut James E Anderson (2009) pengertian “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok guna untuk memecahkan masalah tertentu.

Menurut Eston (2012) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai – nilai untuk masyarakat keseluruhan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan dialokasikan dalam nilai – nilai untuk seluruh masyarakat.

Menurut Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kismantini (2019) pengertian kebijakan adalah arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas misalnya kebijakan pemerintah tentang sistem jaminan sosial melalui undang – undang nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah suatu area tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam

kebijakan pemerintah tentang system jaminan sosial dengan melalui undang - undang.

Menurut Kamal Almanyah (2016) pengertian kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur baik dalam pusat maupun daerah.

Menurut Nasucha (2004) pengertian kebijakan adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan dalam perangkat peraturan hukum. kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan yang harmonis.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah suatu kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan perangkat aturan hukum agar menjalin hubungan yang harmonis.

Menurut Dunn (2003) pengertian kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual dilakukan dalam kegiatan yang bersifat politik.

Menurut Rusdiana (2015) pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah organisasi dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar baik didalam pekerjaan kepemimpinan maupun cara mengambil sebuah tindakan dan sebagainya.

Menurut Hamid (2015) pengertian kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mengarah dengan adanya hambatan – hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan yang akan dibuat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah didalam lingkungan tertentu yang mengarah dengan adanya hambatan – hambatan serta kesempatan didalam pelaksanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Budiman Rusli (2013) pengertian kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan publik bukan tujuan orang perorang atau kolompok.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai suatu mencapai tujuan perorang atau kolompok.

Menurut Nugroho (2016) pengertian kebijakan adalah berasal murni dari pertimbangan akal manusia sekalipun demikian tentu manusia yang lebih

dominan dalam pemilihan opsi – opsi kebijakan karena didalam pemutusannya terdapat penekanan kebijaksanaan dari faktor emosional dan rasional, bukan berarti kebijakan tidak rasional akan tetapi mungkin saja pada saat itu rasional belum tercapai atau merupakan intuisi. kebijakan pada umumnya adalah pedoman untuk menuju tujuan yang terarah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah murni dari pertimbangan akal dari manusia dalam pemilihan opsi kebijakan karena didalam pemutusan kebijakan harus ada pedoman untuk mencapai tujuan.

Menurut Parsons (2006) pengertian kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale* sebuah manifestasi dan penilaian pertimbangan artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah suatu aksi atau rencana yang mengandung tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan.

Menurut dye (2008) pengertian kebijakan adalah apaupun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan maka harus ada tujuan dan kebijakan Negara tersebut meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata – semata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan

Negara, hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukakan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah Sesuatu yang dipilih dan dilakukan atau tidak dilakukan yang bukan semata – mata pernyataan atau keinginan pemerintah atau pejabat dan disamping itu harus dilaksanakan oleh pemerintah yang dimana kebijakan yang mempunyai pengaruh besar.

Menurut Parson (2005) pengertian kebijakan adalah sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara ,yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori dan model, dan sebagai sebuah proses. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud – maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan, kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan kebijakan memiliki di masa depan kebijakan juga menunjukkan pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional dan kebijakan juga melibatkan peran dari peran agen kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebagai label untuk sebuah bidang dan aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara ,yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori dan

model, dan sebagai sebuah proses. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud – maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan.

Menurut Anderson (2002) adalah memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, kebijakan berkaitan dengan tindakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebuah pemahaman kebijakan yang berupa serangkaian tindakan dalam melakukan atau menghadapi sebuah permasalahan yang ada dan sudah ditentukan.

Menurut Nugroho (2009) pengertian kebijakan adalah kebijakan yang memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri – sendiri, kebijakan publik merupakan salah satu komponen Negara yang tidak boleh diabaikan, Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah kebijakan yang memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri – sendiri, dan kebijakan publik merupakan salah satu komponen Negara yang tidak boleh diabaikan, Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur

oleh seseorang atau sekelompok yang harus berkaitan dengan kebijakan yang sudah ditentukan.

Menurut Abidin (2006) kebijakan terbagi dalam tiga level, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaa, dan kebikan teknis. Kebijakan umum merupakan kebijakan umum yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif yang mencakupi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum pada level pusat, peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang – undang dan peraturan materi untuk melaksanakan peraturan presiden merupakan contoh dari kebijakan pelaksanaa. Kebijakan teknis merupakan strata paling rendah dari kebijakan kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah kebijakan berdasarkan dengan keputusan dan setiap pelaksanaan yang akan dilakukan harus bersangkutan dengan adanya kebijakan.

Menurut Sudarman Danin (2005) pengertian kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, cita – cita tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebagai rangkaian untuk mencapai sebuah tujuan dalam melalui garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan demi untuk menjalankan

suatu pekerjaan dan sesuai dengan pedoman yang ada sehingga tujuan ingin dicapai dapat terlaksana secara baik dan berhasil.

### c. Bantuan langsung Tunai (BLT)

#### 1. Pengertian Bantuan langsung tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi ditengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Pengertian Bantuan langsung tunai (BLT) menurut para ahli:

#### 2. Edi Suharto (2009)

Menurut Edi Suharto (2009) Pengertian bantuan langsung tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok – kelompok yang rentan menyusul adanya dampak – dampak negatif jangka pendek akibat diterapkan suatu kebijakan.

#### 3. Iqbal Hasbi

Menurut Iqbal Hasbi (2008) Pengertian bantuan langsung tunai (Bahasa Inggris : *cash transfer*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.

### d. Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Fajria nanda Dkk (2014) Pengertian program keluarga harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah

tangga sangat miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Program keluarga harapan (PKH) merupakan suatu program yang dapat memberikan bantuan terhadap rumah tangga yang sangat miskin dan untuk peningkatan sumber daya manusianya yaitu pendidikan dan kesehatan.

## **B. Kajian teori (sebagai landasan teori)**

### **1. Teori Implementasi kebijakan**

Menggunakan teori Implementasi kebijakan karena untuk memfokuskan kajian ini tentang mengenai judul Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar maka disini peneliti berusaha untuk memaparkan kajian teori terkait implementasi kebijakan. hal ini bertujuan agar kajian tentang mengenai implementasi kebijakan ini dapat dijelaskan dengan baik. maka dari itu peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan menurut George C.Edward (2011) berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dialami oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain – lain.
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan .

Berdasarkan teori implemementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa pandangan seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## 2. Teori Implementasi kebijakan

Teori implementasi kebijakan menurut Dewi Rahayu (2016) Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan – tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan – tindakan eperasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. Teori Implementasi kebijakan

Teori Implementasi kebijakan menurut Van Meter (2008) implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu pejabat – pejabat atau kolompok –kolompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam implementasi kebijakan perlu melakukan sebuah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu pejabat – pejabat atau kelompok –kelompok pemerintah atau swasta yang akan diarahkan pada tercapainya suatu tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan serta dengan mengambil suatu kebijakan – kebijakan yang baik dan terstruktur agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara baik maka setiap mengambil suatu kebijakan hal yang perlu dipersiapkan adalah suatu kebijakan yang memang betul – betul dapat diimplemnetasikan secara baik agar tindak yang diambil mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Alasan peneliti mengambil teori Implementasi kebijakan tersebut karena implementasi kebijakan BLT dan PKH yang diterapkan pemerintah di Kepulauan Selayar di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu timur belum terimplementasikan secara baik dan sampai saat ini belum bisa mengalami perubahan karena setiap ada penyaluran bantuan yang disalurkan tidak pernah tersalurkan secara merata oleh sebab itu bantuan tersebut masih belum merata sampai sekarang.

Hubungan antara teori implementasi kebijakan tersebut dengan implementasi kebijakan yang akan diteliti oleh peneliti hubungannya yaitu

dapat dilihat dari bentuk pengimplementasiannya belum berjalan secara efektif.

### C. Kerangka pikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa sifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori dan pernyataan – pernyataan yang logis . didalam kerangka pikir inilah yang akan didudukkan sebuah masalah penelitian yang telah yang diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkapkan atau menerangkan serta menunjukkan perpektif terhadap masalah penelitian. Pertama deduksi proses berpikir yang menggunakan premis – premis umum menuju premis khusus.

Diketahui bahwa dalam Implementasi kebijakan BLT dan PKH pada masyarakat miskin adalah suatu proses penerapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sebuah kebijakan yang berupa bantuan yang dimana bantuan tersebut untuk masyarakat miskin.

Setelah melakukan suatu implementasi kebijakan BLT dan PKH maka diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat miskin khususnya masyarakat yang benar – benar rendah perekonomiannya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji atau mendeskripsikan Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH dan dampak implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir**



#### D. Penelitian relevan

Penelitian relevan adalah sebuah penelitian yang sudah diteliti sebelumnya atau yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau yang memiliki keterkaitan dengan judul dan topik pembahasan yang akan digunakan atau diteliti dan untuk menghindari terjadinya penanggulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang memang benar-benar sudah ada dibuat oleh penelitainya yang dimana mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan judul dan topik yang akan diteliti, dengan tujuan agar tidak terjadi penelitian yang sama atau pengulangan penelitian yang sama.

1. R. Fitnahari tahun (2017) yang berjudul Implementasi kebijakan tentang bantuan langsung tunai (BLT) sebagai program keluarga harapan (PKH) di Desa Penaga Kabupaten Bintang.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa didalam implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Penaga program keluarga harapan merupakan suatu program dalam bentuk bantuan non tunai dan memiliki syarat untuk membantu kepada rumah tangga sangat miskin dan termasuk sosial ekonominya benar – benar tergolong rendah sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) adalah merupakan suatu program bantuan uang secara tunai dan tanpa syarat. pencairan dana di Desa Penaga terbilang jauh jaraknya yaitu Tanjung Uban sehingga masyarakat membutuhkan transportasi untuk menunjuk aktor pos berdasarkan data banyak lansia yang terdata sebagai penerima manfaat BLT.

pencairan dana BLT di Desa Penaga dapat dikatakan belum tepat waktu karena sering terjadi keterlambatan pencairan. pengaruh program BLT ini belum dapat meringankan beban masyarakat penerima manfaat karena tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan tentang BLT sebagai program keluarga harapan (PKH) di Desa Penaga didalam pelaksanaan BLT sebagai PKH belum berjalan secara maksimal.

2. Muhammad Reno Gunarsa tahun (2019) yang berjudul Implementasi program kerluarga harapan (PKH) Kecamatan Cibadak Suka Bumi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa didalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Suka Bumi sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan dan pendamping juga selalu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data, varifikasi komitmen serta pembayaran dilakukan secara rutin yaitu setiap bulan jumlah peserta masyarakat Cibadak sebanyak 1.498 dan faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi PKH dapat dilihat dari tingkat pendidikan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH pendidikan di Kecamatan Cibadak yaitu proses verifikasi dilayanan pendidikan yang kurang bersahabat, koordinalitas sektor yang belum berjalan optimal, tidak ada laporan mengenai penerimaan program dari pendamping kepada SKPD (satuan kerja perangkat Desa), belum tersedia kantor secretariat UPPKH (unit pelaksanaan PKH,

belum ada tersedia buku pedoman operasional PKH bagi pemberi layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Cibadak Suka Bumi belum berjalan secara maksimal karena proses pelayanan pendidikannya masih kurang bersahabat dan penyediaan buku pedoman PKH belum ada.

3. Dian Marini tahun (2015) yang berjudul Dampak penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) terhadap masyarakat miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dampak penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat miskin di Desa perawang tersebut didalam masyarakatnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilannya juga kurang, serta tempat tinggalnya masih status numpang kepada keluarga dan bantuannya tidak merata karena yang mendapat bantuan hanya warga tertentu saja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak penyaluran bantuan langsung tunai yang terdapat di Desa perawang tidak terlalu berdampak karena yang mendapat bantuan hanya warga tertentu saja.

Manfaat BLT bagi masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa dihargai oleh pemerintah peduli terhadap mereka, dan mendaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah membuat masyarakat miskin menjadi malas, dapat menyebabkan pertikaian yang terjadi terhadap sesama

masyarakat, dan masyarakat merasa ketidakpuasan terhadap proses BLT lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

Kebaruan penelitian ini yang mengkaji tentang implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar. pada penelitian ini permasalahan yang membedakan antara penelitian yang lain dengan penelitian saya/peneliti yaitu telah terjadi konflik sosial dan penyimpangan sosial karena pemerintah hanya memberikan bantuan kepada warga tertentu saja serta peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya belum berjalan secara maksimal hingga sampai saat ini. hal ini terjadi karena data nama-nama yang baru tidak terdaftar di pusat sedangkan yang terdaftar namanya di pusat selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah oleh karena itu masih banyak masyarakat yang merasa tidak adil dan terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya oleh sebab itu saya/peneliti sangat tertarik mengambil judul ini mengenai implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. alasan memilih jenis penelitian tersebut yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan penelitian imlementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu pendekatan studi kasus alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena implementasi kebijakan BLT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah di Kepulauan Selayar tidak merata sehingga yang mendapat bantuan BLT dan PKH hanya yang terdaftar namanya di pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di pusat tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut oleh karena itu banyak masyarakat yang mampu mendapat bantuan BLT dan PKH sedangkan masyarakat yang tidak mampu justru tidak mendapat bantuan BLT dan PKH. dari berbagai studi kasus terkait dengan implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar dimana dalam implementasi kebijakan yang ada di Desa Bontomalling masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan tersebut.



### C. Fokus penelitian

Didalam penelitian tentunya selalu fokus terhadap masalah yang akan diteliti oleh karena itu pada penelitian karena sangat penting dalam pengumpulan data sehingga penelitian yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Menurut Agusliansyah, K.(2016) Fokus dalam pandangan penelitian kualitatif adalah bahwa gejala itu bersifat holistik (menyeluruh tidak dapat dipisah – pisah) sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tersebut tetapi keseluruhan situasi yang diteliti, didalam hal ini penelitian tersebut meliputi aspek tempat (*place*) pelaku (aktor) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mencari data dan mengolahnya sehingga menjadi suatu kesimpulan.

Objek dalam permasalahan penelitian ini adalah implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar. implementasi kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan BLT dan PKH belum tersalurkan secara merata hal ini peneliti melihat bahwa masih banyak dikalangan masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar yaitu :

a. Faktor pendukung BLT dan PKH :

1. Rendahnya ekonomi masyarakat.
2. Koordinasi program yang masih perlu ditingkatkan.
3. Adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

b. Faktor penghambat BLT dan PKH :

1. Pelaksanaan program yang tidak berjalan dengan baik.
2. Pelaksana program yang kurang memberikan sosialisasi.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat.

Dampak Implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar penulis melihat bahwa dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan masyarakat menjadi konflik.

Penulis mencoba memberikan Solusi dari ke tiga permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut.

1. Pemerintah dan masyarakat harus saling kerja sama.
2. Pemerintah harus adil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik.

Fokus dalam penelitian ini adalah studi kasus yang terletak di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar yang dimana penelitian ini menyangkut tentang implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar. hal ini didasarkan pada pada permasalahan yang telah ditemukan berupa masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang belum mendapat bantuan. maka dari itu

penulis berfokus pada implementasi kebijakan BLT dan PKH sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Deskripsi fokus berdasarkan solusi fokus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan BLT dan PKH masih belum merata.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH. yang mendukung BLT dan PKH disebabkan karena adanya masyarakat kurang mampu sedangkan yang menghambat BLT dan PKH disebabkan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan pelaksanaan program yang tidak berjalan dengan baik.
3. Dampak yang ditimbulkan implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan masyarakat menjadi konflik oleh karena itu penulis memberikan solusi dimana pemerintah dan masyarakat harus saling kerja sama serta pemerintah harus adil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

#### **D. Informan penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling* dimana peneliti menentukan terlebih dahulu informan yang akan di teliti serta informan yang betul - betul mengetahui implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar (informan kunci). serta beberapa informan yang sering terlibat langsung dalam setiap implementasi kebijakan BLT

dan PKH yang selalu dilaksanakan di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *purposive sampling* adalah suatu penelitian yang sudah ditentukan informannya yang akan diteliti dan informan yang memang betul – betul sudah mengetahui implementasi kebijakan BLT dan PKH.

Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. oleh karena itu penulis memilih untuk menggunakan teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan - pertimbangan atau kriteria - kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel - sampel yang digunakan yang sesuai didalam penelitian tersebut.

Pada penelitian ini kriteria Informan yang dipilih terdiri dari :

1. Pemerintah Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur.
2. Masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH)

No	Nama	Pekerjaan
1.	Andi Suhri	Kepala Desa
2.	Dewi	Petani
3.	Liana	Petani
4	Samina	Petani
5	Joho'	Petani
6	Marwa	Petani
7	Sawati	Petani

8	Mami*	Petani
9	Mariani	Petani
10	Baho*	Petani

#### E. Jenis dan sumber data

##### 1. Data sekunder

Melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang telah di tentukan terlebih dahulu dan ikut serta dalam kegiatan implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

##### 2. Data primer

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar yang telah di teliti oleh beberapa peneliti terdahulu.

#### F. Instrumen penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan didalam mengumpulkan data serta menggunakan lembar teks pertanyaan yang berisi mengenai "Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Adapun instrument penelitian yang digunakan instrument penelitian berupa lembar observasi, panduan wawancara, dokumentasi dan peneliti itu sendiri sebagai pendukung dalam penelitian. adapun instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Catatan Lapangan, berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Pedoman wawancara, berisi seperangkat daftar pertanyaan peneliti sesuai dengan rumusan masalah pertanyaan.
3. Kamera yang digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video.
4. Telpn genggam untuk *recorder*. *Recorder* digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya.
5. Pulpen dan buku yang digunakan untuk menuliskan informasi data yang didapat dari nara sumber.
6. Peneliti itu sendiri.

#### **G. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni :

##### **1. Metode observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagai mana dilihat oleh subjek penelitian, hidup saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek pada keadaan waktu itu. pengamatan

memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. pengamatan memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data.

## 2. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan - pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. instrument ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. wawancara memiliki sifat yang luas, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkapkan dapat digali dengan baik. wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya monumental dari seseorang. penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan agar data yang diperoleh terlihat secara nyata dengan adanya proses dokumentasi.

## H. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan salah satu langka dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dalam keaslian hasil penelitian. menurut Biklen (2019) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. teknik analisis data terbagi menjadi tiga:

### 1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, dengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temukan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan catatan ini.

### 2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan reduksi data pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data hasil penelitian. proses ini juga dinamakan sebagai proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat "kasar" yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat "halus" dan siap dipakai setelah dilakukan penyeleksian, membuat ringkasan, menggolongkan kedalam pola - pola dan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data tidak diperlukan. data yang sudah direduksi juga akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya. reduksi data terus menerus selama penelitian dilaksanakan.

### 3. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti untuk melihat hubungan antara detail data yang ada, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan dengan penyajian data akan dipahami apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih lanjut lagi menganalisis mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian - penyajian data tersebut.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Dalam tahapan ini menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. sebelum membuat kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan, persamaan dan sebagainya yang ada untuk kemudian dipelajari, dianalisa dan disimpulkan. hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan dinafsirkan terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

##### I. Teknik keabsahan data

Keabsahan data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan didalam penelitian dan memutuskan apa bisa dipublikasikan langka analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu mengolompokkannya dan memilih atau memilah dan kemudian

menganalisisnya untuk memperkuat keabsahan data maka peneliti melakukan usaha – usaha yaitu diteliti kredibilitasnya agar data peneliti dapat dipertanggung jawabkan sebagai peneliti maka perlu melakukan teknik sebagai berikut :

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi tau data dengan cara yang berbeda dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. untuk memperoleh kebenaranin formasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga biasa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran tersebut. triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informan yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi sumber data adalah mengkaji kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. misalnya selain melalui wawancara dan obsrvasi. dokumen, tertulis, arsip. dokumen, sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto masing – masing cara ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda , yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda dalam mengenai fenomena yang diteliti.
3. Triangulasi peneliti adalah membandingkan hasil pekerjaan antara seorang peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk

mengecek kembali tingkat kepercayaan data dengan begitu akan memberikan kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih dipercayai.

4. Triangulasi waktu adalah waktu ini juga sering mempengaruhi kredibilitas data. data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat dipagi hari nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau yang lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda pula dan bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka perlu dilakukan secara berulang – ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran umum lokasi penelitian

##### 1. Sejarah singkat Kabupaten Kepulauan Selayar

Pada masa lalu Kabupaten Kepulauan Selayar perubahan nama berdasarkan PP.NO Tahun 2008 adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi selatan Indonesia yang berada ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu kota Benteng Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 123.283 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintah yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Buki Bontomatene, Pasimasunggu Timur, Taka Bonerate Pessimarannu Pasilambena julukannya Selayar adalah tanah doang dan somboyangnya adalah Selayar mapan dan mandiri.(Dirsan 2019)

Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute perdagangan menuju pusat rempah-rempah di Moluccan (Maluku) pada abad ke 14 dipulau Selayar para pedagang singgah untuk mengisi pembekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. dan aktifitas pelayan ini muncullah kata Selayar. nama Selayar berasal dari kata Cedaya (Bahasa Sansekerta) yang berarti satu layar karena konon katanya banyak perahu yang singgah di pulau tersebut. kata cedaya telah diabadikan

namanya dalam kitab Narakertagama karangan empu prapanca pada abad 14 ditulis bahwa pada pertengahan abad ke 14 ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Rajasenagara. Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau – pulau lain diluar Jawa yang berada dibawah kekuasaan Majapahit.

Selain nama Selayar pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Pada masa lalu Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur demi untuk keselamatan mereka. didalam kitab pelayan dan perdagangan aman gappa (abad ke 17) Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya strategis sebagai tempat transit baik untuk ke timur maupun untuk ke barat disebut didalam naskah bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar menuju ke Selayar Malaka dan Johor sewanya 6 rial dari tiap seratu orang. Jejak – jejak orang Cina bermula pada tahun 1235 M Raja Tallo I Makkadae Daeng Mangrangka melakukan perjalanan ke negeri Tiongkok dan menikah dengan seorang putri penguasa setempat yang bernama Tiongkok Raja Tallo Mampir dan bermukim dikampung Bonto Bangun Selayar. selama ini di Selayar Tallo melahirkan putra dan putri diantaranya sin seng (putra) Tian Lai (putri) dan menjadi cikal bakal nenek moyang orang Tiongkok Selayar.

Dan Belanda mulai menerima di Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresiden dimana pertamanya adalah W.

Coutsier ( menjabat dari 1739 – 1743) berturut – turut kemudian Selayar di perintah oleh orang belanda sebanyak 87 residen atau setara dengan seperti asisten, residen, Gesahegber,, WD residen, atau Contoleur. Barulah kepala pemerintah ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad oepoe patta boendoe. Saat ini telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan reseiden telah diganti menjadi Guntjo sodai, pada tahun 1942. dijaman colonial belanda jabatan pemerintah dibawah kereidenan adalah Raganschappen pada saat itu wilayah setiap kecamatan yang dikepalai oleh orang – orang pribumi bergelar” empu” dan kalau memang demikian, maka setidaknya ada pulau Raganschappen laiyolo, Tanete, gantarang, Buki, Laiyolo, Bonto Bangun, dan barang – barang. Dibawah Regaschappen ada kepala pemerintah dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang.

Kemudian Pada tanggal 19 desember 1945 ( hari selasa selain residen hotel yamanto di Surabaya pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari kolompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor colonial ( sekarang kartor PD berdikari) para pemuda ini mengambil alih dari kekuasaan tangan Belanda yang kemudian hari dan tanggal ini jadi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawah oleh oleh Datuk Ribandang, yang ditandai masuk islamnya Raja gantarang, panggil Patta Raja yang kemudian bernama Sultan Alaudin, pemberian Datuk Ribandang,

peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan hari jadi Selayar adalah 29 November 1605.

#### B. Letak geografis

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu diantara 24 kabupaten/kota diprovinsi Sulawesi selatan yang terletak diujung pulau Sulawesi dan memanjang dari utara ke selatan. dan Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 11 kecamatan dan salah satu kecamatan yang terdapat di Kepulauan Selayar adalah Kecamatan Pasimasunggu Timur. daerah ini memiliki kekhususan yakni satu – satunya Kabupaten di Sulawesi selatan yang terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 diantara kadang kala tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang luas Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km wilayah daratan (12,92%) dan 9.146,66km wilayah lautan (87,09%). Fokus penelitiannya berada pada kecamatan pasimasunggu Timur.

Kecamatan pasimasunggu timur memiliki beberapa nama Desa yaitu: Desa Bontomalling, Desa Bontobaru, Desa Bonto bulaeng, Desa Lembang Baji, Desa Ujung. Kecamatan pasimasunggu timur sampai sekarang masih memegang kepercayaan dari para leluhur hingga sampai saat ini. Hal ini terlihat dari segi kebiasaan atau kebudayaan yang selalu mereka lakukan dan adat istiadat kini menjadi sebuah aturan didalam menjalin hubungan dengan yang ada disekitarnya hingga sampai sekarang tali sirahmi masih

terjalin sangat baik, dan adat yang selalu menjadi panutan didalam wilayah Kepulauan Selayar.

Peta kabupaten kepulauan selayar kecamatan pasimasunggu timur.

### PETA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR



#### C. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Selayar pada tahun 2008 tercatat sebanyak 128.554 jiwa yang terdiri dari laki – laki 60.900 jiwa dan perempuan 72.754 jiwa. keadaan penduduk yang ada di Kepulauan Selayar dari dulu sampai sekarang sangat memprihatinkan karena dapat dilihat dari tingkat perekonomiannya masih sangat rendah sehingga sampai saat ini belum mengalami perubahan karena kurangnya lapangan pekerjaan, keterbatasan akses modal serta banyaknya masyarakat yang malas bekerja sehingga angka kemiskinan yang dialami masyarakat Kepulauan Selayar semakin meningkat rumah sakit dan berbicara

mengenai tingkat kesehatan yang terdapat di Kepulauan Selayar benar - benar sangat memprihatinkan karena banyak terdapat satu rumah sakit saja alat-alat kesehatan yang digunakan masih sangat terbatas. dan jarak rumah sakit yang ada di Kepulauan Selayar di kepulauan selayar kecamatan pasimasunggu timur sangat susah untuk dikunjungi karena jarak yang ditempuh sangat sulit untuk dijangkau dan kondisi jalanan yang ada di Kepulauan Selayar juga kurang mendukung. pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Selayar yaitu sebagai petani nelayan dan guru.

berikut adalah tabel pekerjaan masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar

Petani	60%
Nelayan	20%
Guru	20%
Jumlah	100%

Table diatas menunjukkan bahwa pekerjaan paling banyak peminatannya yaitu petani sebanyak 60% dan yang kedua yaitu nelayan sebanyak 20% dan yang paling rendah peminatnya yaitu guru 20%.

#### D. Keadaan pendidikan

Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor yang paling sangat penting didalam kehidupan manusia baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau yang untuk lingkungannya sebab pendidikan sangat berguna untuk semua kalangan masyarakat dan pendidikan ini sangat mempengaruhi cara seseorang dalam berfikir terutama dalam menjenjang

pendidikan perguruan tinggi, dan keadaan pendidikan di Kecamatan Pasimasunggu Timur penduduknya mencapai pendidikan dari tingkat menengah pertama menengah atas dan perguruan tinggi, berikut adalah tabel jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Tabel tingkat pendidikan kecamatan pasimasunggu timur Kepulauan Selayar

Pendidika	Persentase (%)
SD	50
SMP	30
SMA	20
Jumlah	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling rendah yaitu SMA sebanyak 20% dan yang kedua yaitu SMP sebanyak 30% dan yang tertinggi yaitu SD sebanyak 50% tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa responden dianggap mampu untuk menerima dan menyerap setiap ada informasi baik berupa diskusi maupun yang lainnya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

Didalam penelitian ini pada saat melakukan observasi peneliti melihat bahwa Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar dapat dilihat bahwa pada saat penyaluran bantuan masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan dari pemerintah karena pemerintah hanya memberikan bantuan kepada masyarakat yang sudah terdaftar namanya di pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di pusat tidak mendapat bantuan sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang konflik karena merasa pemerintah tidak adil dalam menyalurkan bantuan oleh karena itu banyak masyarakat merasa sangat kecewa. Implementasi kebijakan BLT dan PKH bagi masyarakat merasa sangat senang dan merasa sangat terbantu terutama didalam perekonomian dan bantuan ini dibagikan setiap 3 bulan sehingga membuat masyarakat selalu ingin mendapat bantuan. walaupun bantuan tersebut belum merata.

#### **1. Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.**

Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling: diterapkan atau direncanakan karena adanya masyarakat yang kurang

mampu dan salah satu pada masyarakat di Desa Bontomalling yang mendapat bantuan BLT dan PKH dari pemerintah yaitu :

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan pemerintah kepulauan selayar di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar peneliti melihat bahwa bantuan belum sepenuhnya merata.maka dari itu ada beberapa pendapat dari nforman adalah sebagai berikut :

*Menurut D.A mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana dan cukup bagus karena dapat kita lihat sekarang itu disetiap Desa atau daerah sebagian masyarakat menerima bantuan sudah berhasil terutama pada masyarakat yang kurang mampu akan tetapi masih banyak warga yang tidak dapat bantuan dan seharusnya pemerintah memperhatikan hal – hal tersebut dimana masih banyak masyarakat miskin yang masih membutuhkan bantuan akan tetapi tidak mendapat bantuan tersebut,dan untuk mendapatkan bantuan BLT dan PKH harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah oleh karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan BLT dan PKH yaitu syarat yang pertama harus termasuk masyarakat yang kurang mampu.*

*(wawancara D.A masyarakat di Desa Bontomalling 6/05/2021).*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama D.A mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana dan yang berhak menerima bantuan BLT dan PKH yaitu masyarakat yang

kurang mampu akan tetapi masih banyak yang belum mendapatkan karena bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak merata

*Menurut R.S mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan. Implementasi kebijakan BLT dan PKH belum sepenuhnya dapat tersalurkan secara merata karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLT dan PKH karena yang mendapatkan bantuan hanya yang terdaftar namanya di Pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di Pusat tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH oleh karena itu masih banyak masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH sedangkan yang mendapat bantuan BLT dan PKH justru orang yang mampu yang mendapat bantuan BLT dan PKH. (wawancara R.S masyarakat di Desa Bontomalling 10/05/2021).*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama R.S mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan. Implementasi kebijakan BLT dan PKH belum sepenuhnya dapat tersalurkan secara merata karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLT dan PKH karena yang mendapatkan bantuan hanya yang terdaftar namanya di Pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di Pusat tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH.

*Menurut T.O mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana dan implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan karena banyak masyarakat yang kurang mampu yang dimana masih banyak masyarakat yang rendah ekonominya, terutama banyaknya masyarakat yang menjadi petani dan nelayan serta kurangnya lapangan pekerjaan. dan implementasi kebijakan blt dan pkh ini disalurkan untuk semua kalangan masyarakat karena bantuan BLT langsung dari pusat dan untuk penyalurannya diinformasikan oleh dusun masing – masing Sementara PKH dari kedinesan dan bantuan PKH disalurkan*

*berdasarkan tingkatan dan tingkat yang dimaksud disini yaitu dari tingkat pendidikan dari TK SMP SMA bahkan ibu-ibu yang memiliki anak balita sertan adanya masyarakat yang kurang mampu.*

*(wawancara D.A masyarakat di Desa Bontomalling/11/05/2021).*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama T.O mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana dan implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan karena banyak masyarakat yang kurang mampu yang dimana masih banyak masyarakat yang rendah ekonominya, terutama banyaknya masyarakat yang menjadi petani dan nelayan serta kurangnya lapangan pekerjaan. dan implementasi kebijakan blt dan pkh ini disalurkan untuk semua kalangan masyarakat karena bantuan BLT langsung dari pusat dan untuk penyalurannya diinformasikan oleh dusun masing – masing Sementara PKH dari kedinesan dan bantuan PKH disalurkan berdasarkan tingkatan dan tingkat yang dimaksud disini yaitu dari tingkat pendidikan dari TK SMP SMA bahkan ibu-ibu yang memiliki anak balita sertan adanya masyarakat yang kurangmampu.

Tindak lanjut dokumentasi data jumlah penduduk yang mendapatkan BLT dan PKH yaitu masyarakat desa bontomalling mengiginkan pemerintah harus adil dalam memberikan bantuan terhadap masyarakatnya supaya bantuan BLT dan PKH tersebut dapat tersalurkan secara merata karena dapat dilihat dari vanomena yang terjadi didalam masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan bantuan BLT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah.

**2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.**

**a. Faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling.**

Didalam penyaluran bantuan tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat sehingga bantuan tersebut dapat tersalurkan secara baik oleh karena itu ada beberapa pendapat dari masyarakat sebagai berikut.

*Menurut S.A mengatakan bahwa faktor pendukung implelementasi kebijakan BLT dan PKH karena adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.  
(Wawancara S.A masyarakat di Desa Bontomalling/9/06/2021).*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama S.A mengatakan bahwa Faktor pendukung dan yaitu diakibatkan karena adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah sehingga bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dapat tersalurkan kepada masyarakat.

*Menurut I.S mengatakan bahwa faktor pendukung implelementasi kebijakan BLT dan PKH diakibatkan oleh adanya masyarakat kurang mampu sehingga banyak dikalagan masyarakat yang mendapatkan bantuan.  
(Wawancara I.S masyarakat di Desa Bontomalling/17/06/2021).*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama I.S mengatakan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH yaitu diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu oleh sebab itu sampai banyak yang mendapatkan bantuan BLT dan PKH dari pemerintah.

*Menurut M.A mengatakan bahwa Faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH, yaitu adanya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja yang diterapkan oleh pemerintah oleh karena itu bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dapat tersalurkan.  
(Wawancara M.A masyarakat di Desa Bontomalling 19/06/2021).*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama M.A mengatakatakan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH yaitu adanya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja yang diterapkan oleh pemerintah.

b. Faktor penghambat implemementasi kebijakan BLT dan PKH

Didalam penyaluran bantuan tentunya pasti memiliki beberapa sehingga bantuan yang disalurkan tidak dapat tersalurkan oleh karena itu masih banyak dikalangan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

*Menurut K.L Faktor penghambat implemementasi kebijakan BLT dan PKH karena tidak adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah serta penghambat yang kedua yaitu karena kurangnya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.*

*(Wawancara K.L masyarakat di Desa Bontomalling 9/07/2021).*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama K.L Mengatakan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH karena tidak adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah serta penghambat yang kedua yaitu karena kurangnya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga bantuan tidak dapat tersalurkan.

*Menurut I.I mengatakan bahwa faktor penghambat implemementasi kebijakan BLT dan PKH diakibatkan oleh kurangnya relawan atau SDM yang menyalurkan bantuan BLT dan PKH oleh karena itu bantuan terkadang bisa disalurkan dan kadang juga tidak bisa tersalurkan.*

*(Wawancara I.I masyarakat di Desa Bontomalling 10/07/2021).*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama I.I Mengatakan bahwa faktor pendukung implemementasi kebijakan BLT dan PKH diakibatkan oleh kurangnya relawan atau SDM yang menyalurkan bantuan BLT dan PKH oleh karena itu bantuan terkadang bisa disalurkan dan kadang juga tidak bisa tersalurkan.

*Menurut M.I mengatakan bahwa faktor penghambat implemementasi kebijakan BLT dan PKH diakibatkan oleh*

*kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja yang diterapkan oleh pemerintah oleh karena itu bantuan tidak dapat tersalurkan.*

*(Wawancara M.I masyarakat di Desa Bontomalling/11/07/2021.*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama M.I bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH diakibatkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja yang diterapkan oleh pemerintah oleh karena itu bantuan tidak dapat tersalurkan.

### **3. Dampak Implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timut Kepulauan Selayar.**

Walaupun pemerintah sudah menyalurkan bantuan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat tersebut tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dampak bantuan BLT dan PKH ini sangat berdampak karena masyarakat harus tetap mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan terutama dalam bantuan perekonomian, yang dimana bantuan tersebut berupa bantuan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

#### **1. Dampak positif**

Didalam kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki dampak yang berbeda-beda dimana yang ditemukan selama implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan ada dampak positif yang timbulkan dan salah satu informan memiliki beberapa pendapat yang berbeda – beda tentang

mengenai dampak positif implementasi kebijakan BLT dan PKH adalah sebagai berikut.

*Menurut S.A mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membantu masyarakat terutama dalam hal perekonomian dan sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.  
(Wawancara S.A masyarakat di Desa Bontomalling 20/06/2021).*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama S.A mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membantu masyarakat terutama dalam hal perekonomian dan sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.

*Menurut L.U mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin dapat meringankan beban perekonomian yaitu ketika masyarakat kehilangan pekerjaan mereka mendapat bantuan dari pemerintah seperti diberikan bantuan uang tunai, beras, telur.  
(Wawancara L.U masyarakat di Desa Bontomalling 21/06/2021).*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama L.U mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap

masyarakat miskin yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka masih bisa mendapatkan bantuan BLT dan PKH dari pemerintah dan bantuan yang diberikan seperti bantuan uang, beras, dan telur oleh karena itu banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut.

*Menurut K,A mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu bantuan tersebut dapat meringankan beban perekonomian masyarakat yang kurang mampu terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.  
(Wawancara K,A masyarakat di Desa Bontomalling 24/06/2021)*

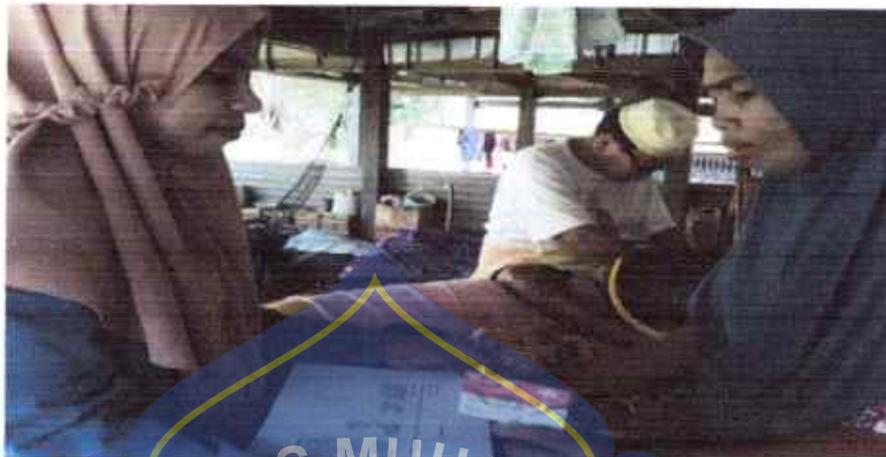


*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama K,A Mengatakan bahwa dampak positif implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu bantuan yang tersebut dapat meringankan beban perekonomian masyarakat yang kurang mampu terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

*Menurut M,A mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat*

*meringankan perekonomian masyarakat terutama pada orangtua yang memiliki anak yang masih sekolah serta memiliki anak balita. (Wawancara M.A masyarakat di Desa Bontomalling/25/06/2021)*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama M.A mengatakan bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat meringankan beban perekonomian masyarakat khususnya pada orangtua yang memiliki anak yang masih sekolah serta memiliki anak balita.

#### I. Dampak negatif

Didalam kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki dampak yang berbeda- beda dimana yang ditemukan selama implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan ada dampak negatifnya yang timbulkan dan salah satu informan memiliki beberapa pendapat yang berbeda – beda tentang mengenai dampak negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH adalah sebagai berikut.

*Menurut T.I mengatakan bahwa dampak negatif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu tidak tersalurkan secara merata karena yang mendapat bantuan BLT*

dan PKH hanya sebagian masyarakat sedangkan yang lain tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut.

(Wawancara T.I masyarakat di Desa Bontomalling /26/06/2021)



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama T.I Mengatakan bahwa dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu tidak tersalurkan secara merata karena yang mendapat bantuan hanya sebagian masyarakat sedangkan yang lain tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut.

*Menurut R.E mengatakan bahwa dampak negatif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membuat masyarakat menjadi malas bekerja karena selalu ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.*

(Wawancara R.E masyarakat di Desa Bontomalling 27/06/2021).

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama R.E mengatakan bahwa dampak negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membuat masyarakat menjadi malas bekerja. karena selalu ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah..

*Menurut M.U mengatakan bahwa dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membuat masyarakat menjadi konflik karena terkadang masyarakat masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan sedangkan yang masyarakat yang mampu justru tidak*

*mendapatkan bantuan oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama M.U mengatakan bahwa dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membuat masyarakat menjadi konflik karena terkadang masyarakat masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan sedangkan yang masyarakat yang mampu justru tidak mendapatkan bantuan oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

*Memurut S.U Mengatakan bahwa dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan bisa menimbulkan konflik karena banyak masyarakat memiliki kesalahpahaman dan merasa tidak adil oleh sebab itu timbulah perkonflikan antara sesama masyarakat  
(S.U masyarakat di Desa Bontomalling 3/7/2021)*



*Sumber kamera handpone*

Berdasarkan hasil observasi tersebut bersama S.U mengatakan bahwa dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu dapat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

## B. Pembahasan

### 1. Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling

Implementasi kebijakan BLT dan PKH yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar banyak masyarakat yang menjadikan sumber pendapatan dimana dapat dilihat dari segi bantuan yang disalurkan oleh pemerintah banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut dan semenjak dengan adanya bantuan BLT dan PKH tersebut banyak masyarakat merasa sangat senang karena setiap 3 bulan mereka mendapatkan bantuan BLT dan PKH dari pemerintah sementara itu banyak juga masyarakat yang merasa iri dan merasa tidak adil karena bantuan BLT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah tidak merata karena terkadang yang mendapatkan bantuan BLT dan PKH justru mampu sedangkan yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH sehingga terjadilah perkonflikan antara sesama masyarakat.

Sementara itu sebagaimana dalam implementasi kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya terutama dalam membantu pada bagian perekonomian banyak kalangan masyarakat yang memiliki pendapat yang berbeda secara belum sepenuhnya semua masyarakat terbantu karena bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak merata sampai sekarang dan pada akhirnya banyak masyarakat yang merasa sangat tidak terbantu sama sekali karena yang mendapatkan bantuan hanya yang terdaftar namanya di pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di pusat

tidak mendapatkan bantuan tersebut. bantuan BLT dan PKH ini merupakan salah satu contoh bahwasanya apa yang diinginkan tidak semuanya dapat terpenuhi semuanya karena terpenuhi sesungguhnya yang bisa terpenuhi adalah cukup sesuai dengan kebutuhan saja.

Implementasi kebijakan juga sebagai proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (kolompok/individu), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dengan apa jenis kebijakan yang akan dilaksanakan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik maka dari itu didalam implementasi kebijakan harus tetap berpatokan pada jenis pelaksanaan apa saja yang memang harus betul-betul dijalankan, maka dari itu implementasi kebijakan didalam pelaksanaan program bantuan harus berlandaskan dengan adanya jenis implementasi kebijakan karena tanpa implementasi kebijakan program kerja apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik contohnya seperti sekarang ini pada penyaluran BLT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi kebijakan menurut George C.Edward (2011) berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- e. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- f. Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- g. Disposisi, (perintah) adalah watak dan karakteristik yang dialami oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain – lain.
- h. Struktur birokrasi, (pembagian kerja) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan .

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa pandangan seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi (perintah) dan struktur birokrasi (pembagian kerja).

## **2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan BLT dan PKH.**

Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH karena adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, adanya masyarakat kurang mampu, adanya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja yang diterapkan oleh pemerintah.

Selain memiliki faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH juga memiliki faktor penghambat. dan salah satu faktor penghambatnya

implementasi kebijakan BLT dan PKH karena tidak adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, kurangnya relawan atau SDM yang menyalurkan bantuan, kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja yang diterapkan oleh pemerintah oleh sebab itu bantuan BLT dan PKH dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

hubungan antara teori implementasi kebijakan tersebut dengan implementasi kebijakan yang diteliti oleh peneliti hubungannya yaitu dapat dilihat dari bentuk pengimplementasiannya belum berjalan secara efektif karena sampai sekarang penyaluran belum merata.

Hal tersebut sejalan dengan dengan teori Implementasi kebijakan menurut Dewi Rahayu (2016) Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan – tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan – tindakan eperasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam implementasi kebijakan tindakan – tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan demi untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Dampak implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin.

Salah satu dampak positif yang ditimbulkan implelementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin. Salah satunya yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu terutama bagi seseorang yang mempunyai anak masih sekolah dari TK SMP SMA bahkan ibu- ibu yang masih mempunyai anak balita dan lain – lain oleh karena itu bantuan BLT dan PKH ini memang betul – betul sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat

Selain menimbulkan dampak positif implelementasi kebijakan BLT dan PKH juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat miskin salah satu dampak negatifnya yaitu dapat membuat masyarakat menjadi konflik karena yang mendapatkan bantuan hanya sebagian masyarakat oleh karena itu banyak masyarakat yang merasa iri dan kecewa terhadap pemerintah karena yang mendapat bantuan BLT dan PKH hanya orang- orang tertentu saja sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut. maka dari itu implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin memang betul – betul sangat berdampak karena arti dari kemiskinan itu termasuk keadaan ketidakmampuan akses secara ekonomi dan banyak masyarakat menjadi miskin karena rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan yang rendah serta kurangnya lapangan pekerjaan, angka penganggura yang tinggi, dan adanya pemutusan hak kerja (PHK) .

Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi kebijakan menurut Van Meter (2008) implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam implementasi kebijakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya Implementasi Kebijakan BLT dan PKH bagi masyarakat (studi kasus masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar). Maka dari peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar tidak terlalu berdampak karena masih bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak merata dan dampak yang timbulkan bantuan BLT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah dapat membuat sebagian masyarakat merasa sangat terbantu terutama dalam perekonomian yang dimana banyak orangtua yang memiliki anak yang masih sekolah dan masih balita serta memenuhi kebutuhan sehari – hari dan banyak masyarakat yang merasa iri dan merasa tidak adil karena pemerintah hanya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdaftar namanya saja sehingga dapat memicu terjadinya kekonflikan antara sesama masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar maka dari itu penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah harus saling kerja sama dengan masyarakat karena tanpa adanya kerja sama maka pekerjaan apapun itu tidak akan mudah diselesaikan apabila tidak ada kerja sama.
2. Pemerintah harus mensosialisasikan apa – apa saja syarat harus dipenuhi agar bantuan tersebut bisa merata karena tanpa sosialisasi setiap yang diprogramkan tidak akan dapat berjalan secara baik apabila tidak ada sosialisasi.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperbaiki atau menyempurnakan tentang penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anggara Sahya.2014.Kebijakan publik.Bandung : CV Pustaka setia.
- Arifin Tahir.2014.Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah.Bandung : Alvabeta, cv.
- Ahmad .2015. Kebijakan pendidikan.Bandung : CV Pustaka setia.
- Budiman Rusli.2013.Kebijakan publik membangun pelayanan publik yang responsif.Bandung : Hakim publishing.
- Banjarnahor, Rama Jeliana.(2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) Universitas Dharmawangsa : Diss.
- Handoyono Eko.2012.Kebijakan publik Semarang. Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang.
- Fajria nanda.2014.Efektiiitas program keluarga harapan Banda Aceh : fakultas dakwah jurusan pengembangan masyarakat islam UIN Ar-Raniry.
- Guntur setiawan.2004.Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Jakarta : Balai pustaka.
- Ismi.2018. Analisis regresi data panel pada faktor – faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi selatan. Makassar : Diss (Doktoral dissertation).
- Miftachul Choiri Dkk.2019.Metode penelitian kualitatif dibidang pendidikan.Ponogoro : C.Nata karya.
- Madjid.2018.Analisis Kebijakan pendidikan.Yogyakarta : Samudra biru.
- Maisah.2019.Analis Kebijakan pendidikan karakter.Jambi : Wade group.
- Nursalam Dkk.2016.*Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia*.Yogyakarta : Writing Revolution.
- Rudi Kurniawan Dkk.2019.Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Kampus Bukit indah lhokseumawa : Unimal Press.
- Rukiyati.2017.Analisis kebijakan sekolah ramah anak dikawasan posisir wisata.Yogyakarta : C.V Andi offset.

Rama Jeliana dkk.2020.Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Universitas Dharmawangsa : Diss.

Suharto, Edi.2008. Analisis kebijakan publik,edisi revisi, Bandung: Alfabeta.

Situmorong.2016.Kebijakan publik.Depok : Sosial security development institute (ssdi).

Taufiqurakhman.2014.Kebijakan publik.Jakarta : Universitas Moestopo.

Tachjan.2008.Implmentasi kebijakan publik.Bandung : Alfabeta.

Yudi Rusfiana.2016. Teori dan analisis kebajikan publik.Bandung : Alvabeta,cv

Zainal Abidin, Said.2012.Kebijakan publik. Jakarta : Salemba humanika.

#### **Jurnal:**

Abdul.2015. Kelayakan kualitas air untuk kawasan budidaya *Eucheuma cottoni* berdasarkan aspek fisika kimia dan biologi di Kabupaten Kepulauan Selayar diakses tanggal 27 Februari 2020.

Agusliansyah, K.2016 peran kepala Desa dalam pengelolaan badan usaha milik Desa Jemparing Kecamatan Long Iklis Kabupaten Paser diakses tanggal 10 April 2021.

Muhammmad Reno gunarsa.2019.Jurnal ummi.ac.id Implementasi program keluarga harapan (PKH) di dinas sosial kabupaten suka bumi diakses tanggal 7 Oktober 2020.

Nurhamlin,dian marini.2015.Dampak penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarak miskin di Desa perawang barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak diakses tanggal 14 Oktober 2020.

Nurhaliza .2020.implementasi program keluarga harapan Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun diakses tanggal 13 juli 2021.

Sasuwuk,C.H.,Lengkong,F.,&Palar, N.2021.Implementasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi covid 19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa diakses tanggal 16 Agustus 2021.

Womu, C.,Lengkong,f & Dengo, S.2019. Dampak program keluarga harapan Kabupaten Minahasa Utara diakses tanggal 1 Maret 2020.

#### **Skripsi:**

- Bainta, Faried.2010.Studi pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.Diss. Univrsitas islam Negeri muhammadiyah Makassar diakses tanggal 1 Maret 2020.
- Dirsan.2019.Eksistensi dalam kontestasi politik studi kasus di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Muhammadiyah Makassar diakses 9 juli 2021.
- Iqbal, Hasbi.2008.Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di Kabupaten Kudus: Semarang : Universitas di Ponegoro diakses tanggal 28 september 2020.
- R Finahari.2017.Implementasi kebijakan tentang bantuan langsung tunai (BLT) sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penaga Kabupaten Bintang .diakses tanggal 28 september 2020.



L

A

M

P

I

R

A

N



**Pedoman wawancara**

Nama : Risnawati

NIM : 105381105316

Judul Penelitian : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Hari/tanggal:

Tempat :

No	Rumusan masalah	Informan	Item Pertanyaan
1.	Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kepulauan Selayar</li> <li>Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana ?</li> <li>2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan masyarakat ?</li> <li>3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah selama implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan dapat membuat masyarakat menjadi malas bekerja ?</li> <li>4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan ?</li> <li>5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi pengangguran ?</li> <li>6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu keterbatasan ekonomi masyarakat</li> </ol>
2.	Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menurut pendapat bapak/ibu apakah faktor pendukung dan penghambat BLT dan PKH ?</li> <li>8. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH tidak dapat tersalurkan jika masyarakat kurang berpartisipasi ?</li> <li>9. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat tersalurkan jika tidak ada sosialisasi ?</li> </ol>

		<p>10. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan diterapkannya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu masyarakat yang kurang mampu ?</p> <p>11. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pelaksanaan program pemerintah sudah berjalan secara efektif terutama dalam implementasi kebijakan BLT dan PKH ?</p> <p>12. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan ?</p> <p>13. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang menyebabkan pendidikan masyarakat rendah ?</p>
3.	<p>Dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar</p>	<p>14. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dampak positif dan negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin ?</p> <p>15. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu perekonomian masyarakat?</p> <p>16. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda sehingga menyebabkan konflik?</p> <p>17. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan penyimpangan ?</p>



**Pedoman wawancara**

Nama : Risnawati

NIM : 105381105316

Judul Penelitian : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling  
Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Hari/tanggal:

Tempat :

No	Rumusan masalah	Informan	Item Pertanyaan
1.	Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang mendapat BLT dan PKH.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana ?</li> <li>2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan masyarakat ?</li> <li>3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah selama implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan dapat membuat masyarakat menjadi malas bekerja ?</li> <li>4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan ?</li> <li>5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi pengangguran ?</li> <li>6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu keterbatasan ekonomi masyarakat</li> </ol>
2.	Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.		<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Menurut pendapat bapak/ibu apakah faktor pendukung dan penghambat BLT dan PKH ?</li> <li>15. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH tidak dapat tersalurkan jika masyarakat kurang berpartisipasi ?</li> <li>16. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat tersalurkan jika tidak ada sosialisasi ?</li> </ol>

		<p>17. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan diterapkannya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu masyarakat yang kurang mampu ?</p> <p>18. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pelaksanaan program pemerintah sudah berjalan secara efektif terutama dalam implementasi kebijakan BLT dan PKH ?</p> <p>19. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan ?</p> <p>20. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang menyebabkan pendidikan masyarakat rendah ?</p>
3.	<p>Dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar</p>	<p>18. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dampak positif dan negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin ?</p> <p>19. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu perekonomian masyarakat?</p> <p>20. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda sehingga menyebabkan konflik?</p> <p>21. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan penyimpangan ?</p>



**Pedoman wawancara**

Nama : Risnawati

NIM : 105381105316

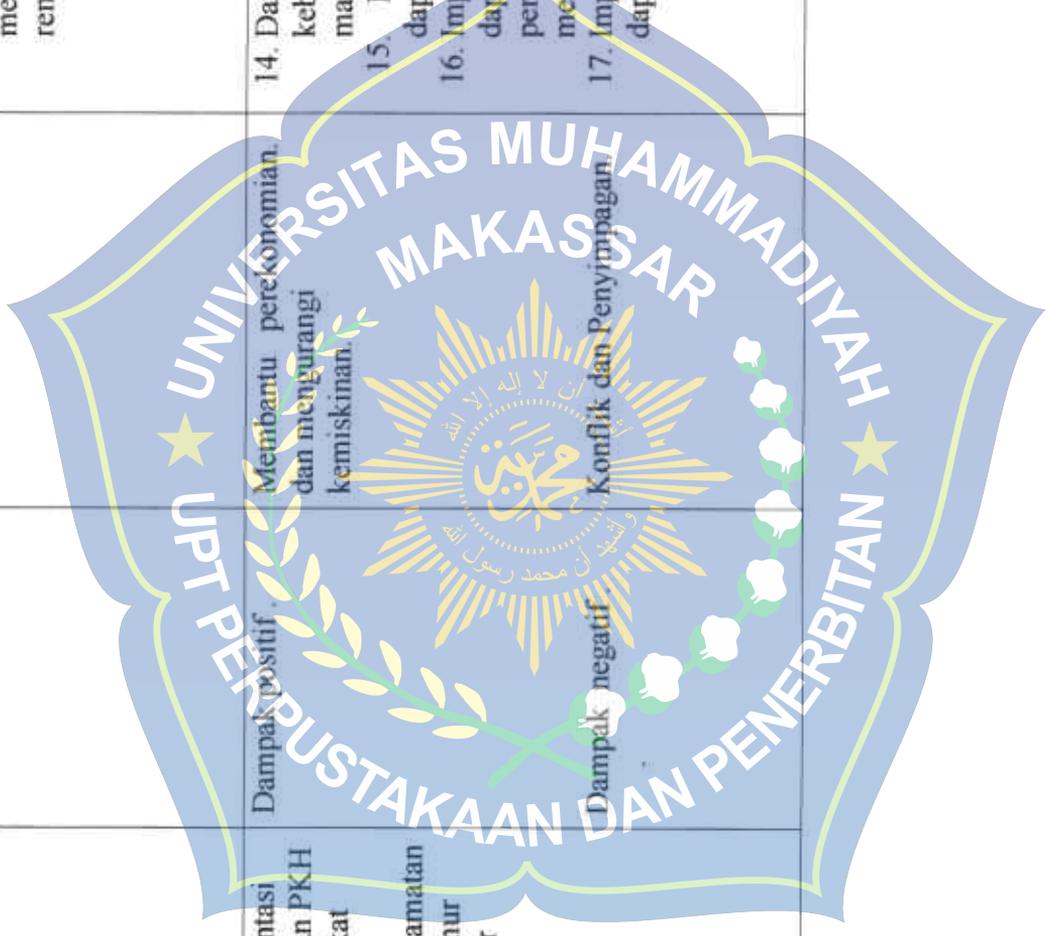
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur

Kepulauan Selayar.

<b>Rumusan masalah</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.	Adanya masyarakat yang miskin /masyarakat yang kurang mampu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Masyarakat yang malas bekerja</li><li>2. Adanya masyarakat pengangguran</li><li>3. Adanya Keterbatasan ekonomi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana ?</li><li>2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan masyarakat ?</li><li>3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah selama implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan dapat membuat masyarakat menjadi malas bekerja ?</li><li>4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan ?</li><li>5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi ?</li></ol>

<p>Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.</p>	<p>Pendukung : 1. Adanya masyarakat miskin. Penghambat : 1. Kurangnya partisipasi masyarakat. 2. Pelaksanaan program yang kurang memberikan sosialisasi. 3. Pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik.</p>	<p>1. Kurangnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan rendah. 2. Adanya Ekonomi rendah. 3. Tidak bekerja sama. 4. Tidak berjalan secara efektif.</p>	<p>6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu keterbatasan ekonomi masyarakat ?</p> <p>7. Menurut pendapat bapak/ibu apakah faktor pendukung dan penghambat BLT dan PKH ?</p> <p>8. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH tidak dapat tersalurkan jika masyarakat kurang berpartisipasi ?</p> <p>9. Menurut pendapat bapak/ibu apakah implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat tersalurkan jika tidak ada sosialisasi ?</p> <p>10. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan diterapkannya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu masyarakat yang kurang mampu ?</p> <p>11. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pelaksanaan program pemerintah sudah berjalan secara efektif terutama dalam implementasi kebijakan BLT dan PKH ?</p> <p>12. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan ?</p> <p>13. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang</p>
--	---	--	--

<p>Dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar</p>	<p>Dampak positif. Membantu perekonomian dan mengurangi kemiskinan.</p>	<p>menyebabkan pendidikan masyarakat rendah ?</p>
	<p>Dampak negatif. Konflik dan Penyimpangan.</p>	<p>14. Dampak positif dan negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin  15. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu perekonomian masyarakat.  16. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda sehingga menyebabkan konflik.  17. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan penyimpangan ?</p>



Pedoman observasi

Nama : Rismawati

NIM : 105381105316

Judul Penelitian : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Rumusan masalah	Indikator	Sub indikator	Hasil Pengamatan	Ya	Tidak	Keterangan
Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.	Adanya masyarakat yang miskin /masyarakat yang kurang mampu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Masyarakat yang malas bekerja.</li> <li>2. Adanya masyarakat yang mengalami gangguan.</li> <li>3. Adanya Keterbatasan ekonomi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana.</li> <li>2. Dengan adanya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan masyarakat.</li> <li>3. Selama implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan dapat membuat masyarakat menjadi malas bekerja.</li> <li>4. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi kemiskinan.</li> <li>5. Dengan adanya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat mengurangi gangguan.</li> <li>6. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu keterbatasan ekonomi masyarakat.</li> </ol>			

<p>Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa Bonomalleng Kecamatan Pasimasinggu Timur Kepulauan Selayar.</p>	<p>Pendukung : 1. Adanya masyarakat miskin. Penghambat : 1. Kurangnya partisipasi masyarakat. 2. Pelaksanaan program yang kurang memberikan sosialisasi. 3. Pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik.</p>	<p>1. Kurangnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan rendah 2. Adanya Ekonomi rendah. 3. Tidak bekerja sama 4. Tidak berjalan secara efektif.</p>	<p>7. Faktor pendukung dan penghambat BLT dan PKH. 8. Implementasi kebijakan BLT dan PKH tidak dapat tersalurkan jika masyarakat kurang berpartisipasi. 9. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat tersalurkan jika tidak ada sosialisasi. 10. Dengan diterapkannya implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. 11. Pelaksanaan program pemerintah sudah berjalan secara efektif terutama dalam implementasi kebijakan BLT dan PKH. 12. Yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan 13. Yang menyebabkan pendidikan masyarakat rendah.</p>		
---	---	--	---	--	--



<p>Dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.</p>	<p>Dampak positif. Dampak negatif.</p>	<p>Membantu perekonomian, dan mengurangi kemiskinan. Konflik dan Penyimpangan</p>	<p>14. Dampak positif dan negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin 15. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat membantu perekonomian masyarakat 16. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda sehingga menyebabkan konflik 17. Implementasi kebijakan BLT dan PKH dapat menyebabkan penyimpangan</p>			
--	--	---	---	--	--	--



**Pedoman dokumentasi**

Nama : Risnawati

NIM : 105381105316

Judul Penelitian : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur  
Kepulauan Selayar.

<b>Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
Peraturan desa mengenai implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kepulauan Selayar	
Program kerja pemerintah Desa mengenai implementasi kebijakan BLT dan PKH	
HP	





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar <sup>90</sup> Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 [www.fkip-unismuh-info](http://www.fkip-unismuh-info)

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama Mahasiswa : Risnawati  
 Nim : 105381105316  
 Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
 Pembimbing I : **Suardi, S.Pd. M.Pd.**  
 Judul Skripsi : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomallig kecamatan pasimasunggu timur kepulauan selayar.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Septu 31/08/2021	Implementasi kebijakan BLT dan PKH	
2.	Jumart 02/09/2021	Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH	
3.	Senin 06/09/2021	Langkah implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat muslim	
4.	Senin 5/10/2021		

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal jika sudah konsultasi ke Dosen pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui  
 Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi

**Drs. H. Nurdin, M.Pd**  
 NBM. 575 474





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar <sup>2020</sup> Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 [www.fkip-untismuh.info](http://www.fkip-untismuh.info)

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama Mahasiswa : Risnawati  
Nim : 105381105316  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Pembimbing 2 : **Herdianty R, S.Pd. M.Pd.**  
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomallig kecamatan pasimasunggu timur kepulauan selayar.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Kamis 5/6/2021	Implementasi kebijakan BLT dan PKH	
2.	Septa 14/08/2021	jabatan pendukung dan penghubung implementasi kebijakan BLT dan PKH	
3.	Kelab 25/08/2021	Widangan kartirifa di kartirifa dengan hasil penelitian	
4.	Selasa 21/09/21		

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal jika sudah konsultasi ke Dosen pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui  
Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi

**H. Nurdin, M.Pd**  
NIM: 575 474





**LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Risnawati

NIM : 105381105316

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Judul : Implementasi kebijakan BLT dan PKH Masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar

Setelah tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Raraf
1	Hadisaputra, S.Pd., M.Si	judul belakang harus ada kecamatan dan kabupaten persamaannya	
2	Sitti Asnaeni AM, S.Sos., M.Pd	- Alasan mengapa penelitian pendekatan studi kasus - Dasar PPS perlu fokus penelitian - Alasan mengapa penelitian per pustaka	
3	Dr. H. Nursalam, M.Si		
4	Suardi, S.Pd, M.Pd		

Makassar, 17 April 2021

Ketua Jurusan

Pendidikan Sosiologi



**Dr. H. Nurdin, M.Pd**  
 NBM. 575 474



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis Tanggal .....14.....H bertepatan tanggal 08 April 2021 bertempat di ruang Lab IPA PGSD kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

Implementasi Kebijakan BRT dan PKH di Desa Benteng Kecamatan Pusimasinggung Timur Kabupaten Selayar

Dari Mahasiswa :

Nama : RISNIAWATI  
 Stambuk/NIM : 105.201.105.316  
 Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
 Moderator : Hardi Saputra, S.Pd., M.Si  
 Hasil Seminar : 2005  
 Alamat/Telp : 081-241-230-831

Dengan penjelasan sebagai berikut :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Disetujui

Penanggung I : Hardi Saputra, S.Pd., M.Si )  
 Penanggung II : Siri Asixioni A.M.S., M.Pd )  
 Penanggung III : Dr. H. Nursalim, M.Si )  
 Penanggung IV : Suardi, S.Pd., M.Pd )

Makassar, 08 April 2021  
Ketua Jurusan

  
  
Suardi, S.Pd., M.Pd  
105.201.105.575 474



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : 1747/05/C.4-VIII/IV/40/2021

14 Ramadhan 1442 H

jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 April 2021 M

jenis : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Kepulauan Selayar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Selayar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 5438/FKIP/A.4-II/IV/1442/2021 tanggal 25 April 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RISNAWATI  
No. Stambuk : 10538 1105316  
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Kebijakan BLT dan PKH Masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Mei 2021 s/d 3 Juli 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR**  
**DESA BONTOMALLING**

**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**

No : 141/132/SKHP-DBM/VII/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 5438/FKIP/A.4-II/IV/1442/2021 tanggal 25 April 2021, perihal Surat Pengantar izin penelitian. Maka dengan ini Kepala Desa Bontomalling menerangkan bahwa :

Nama : RISNAWATI  
No Stambut : 10538 1105316  
Pakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Alamat : Dusun Biropak Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdian selesai melaksanakan Penelitian/Pengumpulan data pada Desa Bontomalling dari bulan Mei hingga Juli dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul : "Implementasi Kebijakan BLT dan PKH Masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
CAMAT PASIMASUNGGU TIMUR

  
H. AWIL TALIB, SKM  
NIP. 19720712 199403 1012

05 Juli 2021  
KAPAL DESA BONTOMALLING  
KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR  
  
ABDUL SUHRI, M



Dokumentasi pada saat wawancara bersama salah satu Masyarakat informan.





Dokumentasi pada saat wawancara bersama salah satu Masyarakat Informa









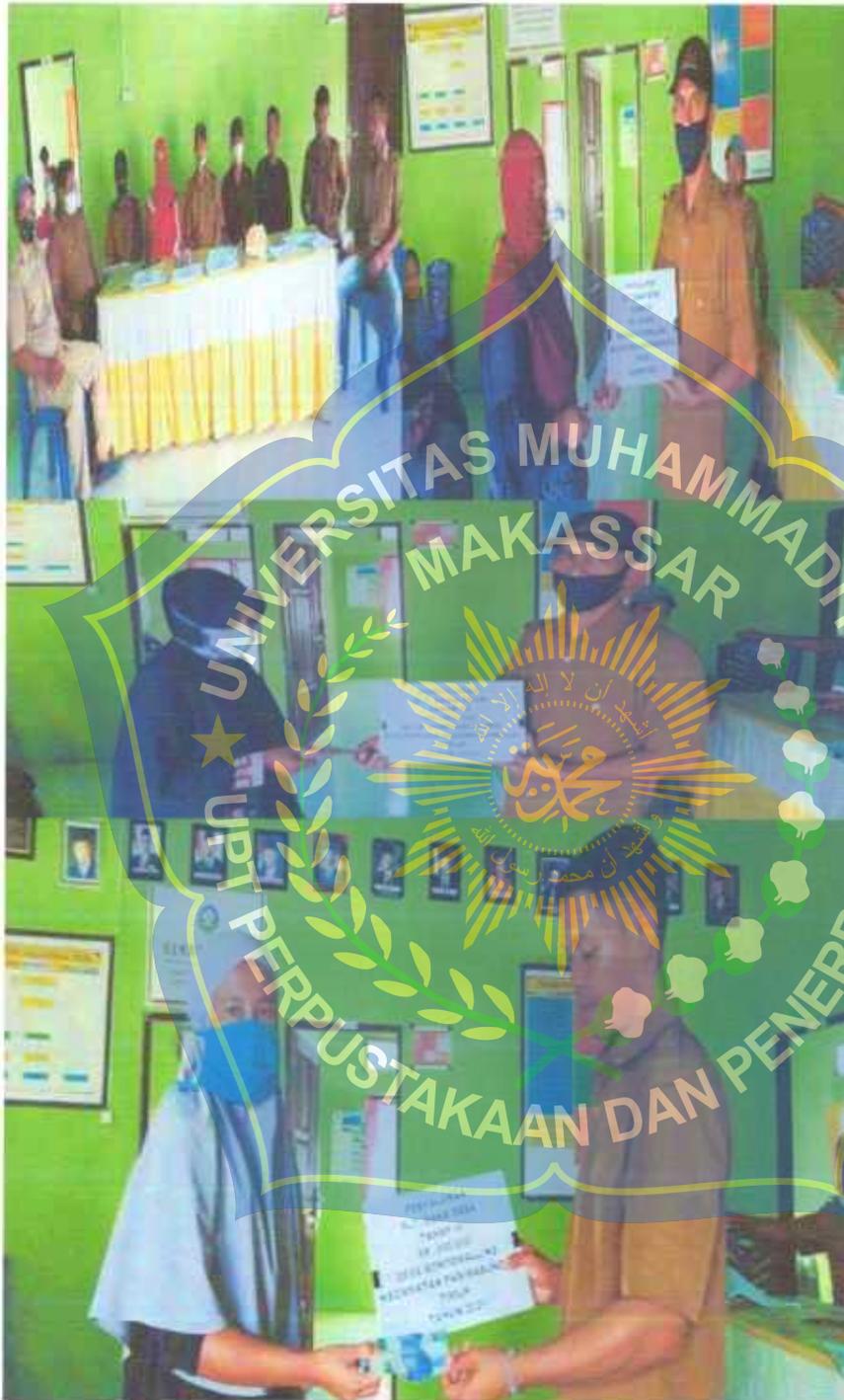
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

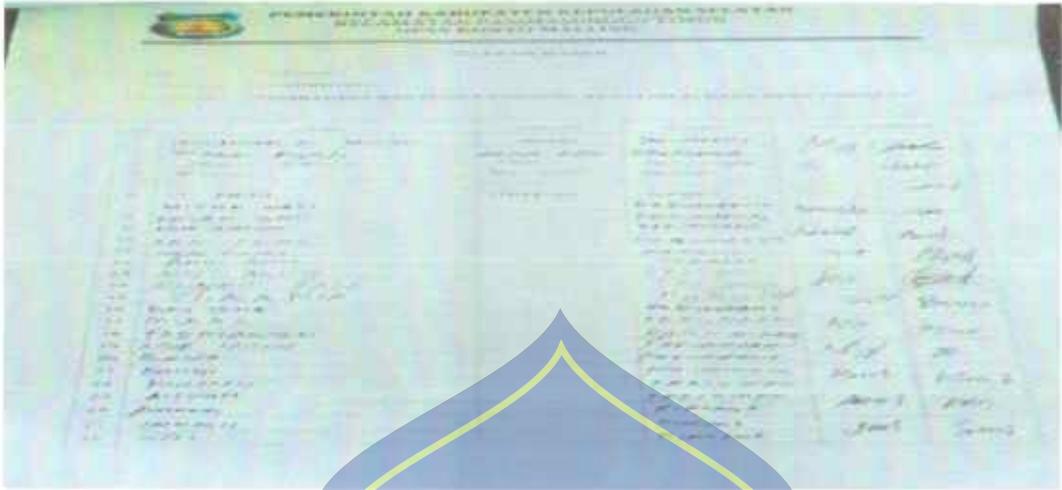
Dokumentasi pada saat wawancara bersama dengan kepala Desa



Dokumentasi pada saat penyaluran bantuan









Palu, 12 Juli 2011  
Kepala Perpustakaan  
Makassar

LEWALANGI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

No	Nama	No. KK	NIP	Alamat	Tempat Lahir	Agama	Angkat Raj.	Var.		
1	ST. AMBA	7301100001000001	7301100001000001	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
2	ANAKHATI	7301100001000002	7301100001000002	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
3	JARA	7301100001000003	7301100001000003	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
4	MAM	7301100001000004	7301100001000004	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
5	ITTI	7301100001000005	7301100001000005	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
6	SHPANG	7301100001000006	7301100001000006	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
7	BHGO	7301100001000007	7301100001000007	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
8	HIMANG	7301100001000008	7301100001000008	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
9	M. BASH	7301100001000009	7301100001000009	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
10	SARAH	7301100001000010	7301100001000010	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		
11	HATTA OR	7301100001000011	7301100001000011	Desa Bontol	Desa Bontol	Islam	1981-01-01	Non POKJ/SPNT		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PELAKSANAAN RIWAYAT SAHIBAT (RIS) DAN RIWAYAT SAHIBAT (RIS) (CONTINUED)  
 DESA BONTOL, KABUPATEN BONTOL, PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 MAREKUN 2021

No	Nama	No. KK	NIP	Alamat	Tempat Lahir	Agama	Angkat Raj.	Var.		
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Marekuni, 13 April 2021  
 Petugas Pendata Keluarga Desa  
 Kepala Desa Bontol (K)

(MAMU)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
 MAKASSAR

No	Nama	Alamat	Tempat	Agama	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Makassar, 12 April 2021  
 Kepala Perpustakaan  
 ...



RISNAWATI - 105381105316

by Tahap Skripsi -



Submission date: 11-Oct-2021 12:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1670821486

File name: RISNAWATI.docx (1.33M)

Page count: 12611

Character count: 84097

9%	19%	8%	11%
CLEARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
INTERNET SOURCES			
digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source			9%
repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source			2%
www.scribd.com Internet Source			1%
sitilailarufaidin.blogspot.com Internet Source			1%
repositori.umh.ac.id Internet Source			1%
repositori.fish-untirta.ac.id Internet Source			1%
eprints.uny.ac.id Internet Source			1%
es.scribd.com Internet Source			1%
Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper			1%



turnitini

*[Signature]*

Nama Instruktur: *Wahid Fakhri*

pendidikan.co.id

Internet Source

1%

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

1%

media.neliti.com

Internet Source

1%

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1%

ude quotes

On

ude bibliography

On

On

ude matches

< 1 w



## RIWAYAT HIDUP



Risnawati dilahirkan di Biropak Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 14 Desember 1997, dari pasangan Ayahanda Tamrin dan Ibunda Liana. Penulis masuk sekolah dasar Pada tahun 2005 di SDN Parumaang dan tamat tahun 2010, tamat SMP Negeri 2 Pasimasunggu Timur Tahun 2013, Dan Tamat SMA Negeri 1 Pasimasunggu Timur Tahun 2016. Pada Tahun 2016 Penulis Melanjutkan Pendidikan Program Studi Sosiologi Di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Selsai tahun 2021

